

Polemik Majelis Ulama Indonesia tentang Konsep Islam Nusantara: Sebuah Analisis Framing Media Online

Zanniro Sururi Hsb^{(a)(*)}

^(a)UIN Sumatra Utara

^(*) Korespondensi Penulis, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, E-mail: zanniro123@gmail.com

A B S T R A C T

Keywords:

Indonesian Ulema Council, Islam Nusantara, Mass Media, Online Media Framing Analysis

This study explores the Indonesian Ulema Council's polemic coverage about the concept of Islam Nusantara through online media framing analysis. To look at online media framing, I use qualitative methods with Robert N. Etnman's framing study that examines two things: selecting issues and the emphasis or promotion of certain aspects. The analysis contained four concepts: defining problems, diagnosing causes, making a moral judgment, and treatment recommendations. The results showed that three online media gave rise to a variety of news reports. Detiknews.com brings up news about scholars' polemic in the Indonesian Ulema Council area behind Islam Nusantara's concept eight times, CNNIndonesia.com five times, and Kompas.com three times. Interpretations of the three online media have different attitudes. Detiknews.com in framing can not be said to be neutral, but there has been a bit of a splash of neutrality by displaying statements as a bit of a counterparty, although dominated by pre-party views. CNNIndonesia.com is more impressed to provoke the public to respond to the construction of reality in framing because many use the election diction provocative title. Kompas.com is more neutral compared to Detiknews.com and CNNIndonesia.com. Kompas media tends to use the principle of cover both sides, and the news is more in the form of articles or public opinion.

A B S T R A K

Kata Kunci:

Majelis Ulama Indonesia, Islam Nusantara, Media Massa, Analisis Framing Media Onlin

Studi ini mencoba untuk mengeksplorasi pemberitaan polemik Majelis Ulama Indonesia tentang konsep Islam Nusantara melalui analisis framing media online. Untuk melihat framing media online, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis framing Robert N. Etnman yang mengkaji dua hal, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu. Analisis tersebut terdapat empat konsep, yaitu define problems (pendefinisian masalah), diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), make moral judgement (membuat pilihan moral), dan treatment recommendation (menekankan penyelesaian). Hasil studi menunjukkan bahwa tiga media online memunculkan vitur berita yang beragam. Detiknews.com memunculkan berita tentang polemik ulama di kawasan MUI dibalik konsep "Islam Nusantara sebanyak 8 kali", CNNIndonesia.com sebanyak 5 kali, dan Kompas.com sebanyak 3 kali. Interpretasi dari ketiga media online tersebut memiliki sikap berbeda-beda. Detiknews.com dalam melakukan framing belum bisa dikatakan netral, akan tetapi sudah ada sedikit percikan kenetralan dengan menampilkan pernyataan sekelumit pihak kontra

walaupun didominasi pernyataan pihak yang pro. CNNIndonesia.com lebih terkesan memprovokasi masyarakat untuk menanggapi konstruksi realitas yang di framing karena banyak menggunakan pemilihan diksi judul yang provokatif. Kompas.com lebih netral dibandingkan dengan Detiknews.com dan CNNIndonesia.com. Media Kompas cenderung menggunakan prinsip cover both side dan pemberitaannya lebih banyak berbentuk artikel ataupun opini masyarakat.

Pendahuluan

Polemik di balik istilah “Islam Nusantara”—di singkat IN—cukup menghebohkan masyarakat belakangan ini. Walaupun istilah ini tidak asing bagi bangsa Indonesia. Jauh sebelum *booming*, istilah IN sudah banyak digunakan di dunia pendidikan sebagai judul buku, tulisan ilmiah, kolom dan tulisan di media lainnya (Azra, 1998; Ninian, 2003; Pribadi, 2019; Ricklefs, 1991, 2012; Salim, 2013). Jika meruntut ke belakang dengan melihat sisi sejarah karya ilmuwan Islam Indonesia, sudah banyak menggunakan istilah IN (Alma’arif, 2015; Huda, 2013; Karim, 2007; Luthfi, 2016; Mubarok & Rustam, 2018; Munfaridah, 2017; Sahal & Aziz, 2015; Tjandrasasmita, 2009). Beberapa studi tersebut menegaskan bahwa posisi IN merupakan entitas bangsa Indonesia sebagai negara multikultur dengan keragaman agama dan budaya.

Selain dari kaca mata pendidikan, penggunaan istilah IN juga banyak digunakan oleh user media sosial yang menjadikan istilah tersebut sebagai status di media sosial (Tjandrasasmita, 2009). Beragam status ini memicu masyarakat untuk menggunakan istilah IN. Pada gilirannya, istilah IN menjadi buah bibir, viral, populer dan heboh diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Terlebih, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj dalam pembukaan acara Istighotsah Menyambut Ramadhan dan Pembukaan Munas Alim Ulama NU, Minggu, 14 Juni 2015 di Masjid

Istiqlal, Jakarta, membuat istilah IN seperti *boom* Hiroshima-Nagasaki membeludak dan mengisi ruang-ruang virtual.

Istilah “Islam Nusantara” yang “dilemparkan” ke publik oleh Ketua Umum PBNU tahun 2015, memicu masyarakat untuk memperbincangkan problem tersebut dengan bahasa oral maupun tulisan. Bahkan beragam media juga tidak ketinggalan untuk mengkonstruksi realitas ini untuk dijadikan konten yang begitu menarik dan menjadi konsumsi masyarakat. Istilah “Islam Nusantara” ini terus memantik dan membuka ruang diskusi di Indonesia. Pada akhirnya terdapat pihak yang pro dan kontra. Cukup banyak pihak ulama sampai ke pihak petinggi di Indonesia yang pro dan kontra dalam merespon problem ini (Munfaridah, 2017). Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pro dengan istilah “Islam Nusantara” dan menyambung ucapan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj. Joko Widodo menceritakan dalam pidatonya di Konferensi-Konferensi Internasional yang diikutinya, seperti KAA (Konferensi Asia Afrika) dan G-20 (Romli, 2018).

Namun ada juga pihak yang kontra terhadap istilah “Islam Nusantara”. Berita di media massa yang kontra pun bergulir ke publik dan menjadi sorotan sekaligus menjadi perdebatan di media-media sosial, media massa, dan tentunya media online juga ikut mengkonstruksi hal ini. Berita yang cukup menghebohkan masyarakat Indonesia khususnya pihak MUI adalah

pihak MUI Sumatera Barat kontra dengan istilah “Islam Nusantara”, walaupun pada kenyataannya pihak pusat setuju akan istilah ini. Sejauh ini, kontra narasi media dalam studi analisis framing tentang polemik Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang konsep Islam Nusantara belum banyak yang membahas secara simplistik. Untuk itu, tulisan ini hadir sebagai respon akademik untuk menjelaskan fenomena Islam Nusantara dari berbagai sisi—baik kontra maupun pro.

Polemik di balik istilah “Islam Nusantara” khususnya tentang pihak ulama yang pro dan kontra menjadikan sebuah peluang untuk dijadikan konten, serta memicu media untuk bersaing memberitakannya. Melihat media yang begitu banyak pada era industri 4.0 ini, tidak heran jika sering pemberitaan fakta antara media yang satu dengan media lainnya berbeda. Terutama media online yang sistemnya harus serba cepat dan kilat demi memperoleh klik dari user. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana media online khususnya Detiknews.com, CNNIndonesia.com, dan Kompas.com melakukan framing terhadap polemik ulama di balik istilah “Islam Nusantara”. Ketiga Media online ini dijadikan objek penelitian dikarenakan termasuk media online yang sangat populer di kalangan masyarakat, sering di klik oleh user, media yang memenuhi syarat UU Pers. Jauh lebih penting, ketiga media online ini sangat rutin memberitakan polemik ulama MUI di balik istilah “Islam Nusantara”.

Media Massa dan Analisis Framing: Pendekatan Teoritis

Pada sub-bab ini penulis mencoba

untuk menjelaskan makna penting dari definisi media online. Di sisi lain, langkah berikutnya penulis juga mencoba untuk menjelaskan analisis framing media online menurut Etnman.

Media Online dan Berita

Media online merupakan sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Jenis media online ini banyak sebutan lain seperti portal, website, radio online, televisi online, pers online, dan lain-lain. Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktek jurnalistik modern adalah situs berita yang memiliki produk media online berupa berita. Menurut Bleyer, berita didefinisikan “segala sesuatu yang menarik perhatian sejumlah pembaca dan berita yang paling baik adalah berita yang paling menarik bagi sejumlah pembaca yang paling besar” (Bleyer, 2015, p. 127). Sementara itu, Mitchel mengatakan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai suatu fakta atau opini yang mengandung hal menarik minat atau penting atau kedua-duanya bagi sejumlah penduduk (Stephens, 1998, p. 215).

Media semakin bersifat global. Sebuah peristiwa di satu ujung dunia, bisa diketahui oleh bagian dunia lain, karena sifat media yang sudah mengglobal tersebut. Dengan sebuah teknologi, datangnya informasi ke tangan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Internet dianggap sebagai “superhero” di era globalisasi karena banyak membawa dampak yang positif (Burbules & Torres, 2000). Pengetahuan teknologi yang semakin canggih dapat membawa dampak atau pengaruh besar bagi para penggunanya. Maka dari itu, kini banyak pihak berebut menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Inovasi

ini menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh internet sebagai media online untuk memenuhi kebutuhannya atau sekedar untuk mengikuti trend yang sedang merambah kehidupan seluruh masyarakat. Online news diartikan sebagai media yang berkapasitas menawarkan berita live, audio, dan video yang terbentuk berdasarkan teknologi hypermedia dan hypertext yang berkembang pesat meliputi suara dan grafis. Online news masih memiliki keterkaitan dengan koran cetak tradisional (teks dan foto). Tetapi, online news juga memiliki potensi untuk memanfaatkan berbagai fitur baru dari dunia pencampuran komunikasi media digital: audio, video, animasi, dan user control (Craig, 2005, p. 4).

Kelebihan dari online news ini adalah beritanya yang selalu diperbaharui secara berkelanjutan (*continous update*), memiliki interaktivitas, hypertext, dan multimedia (Craig, 2005, p. 5). Selain menawarkan kecanggihan masa kini dan masa depan, online news juga membawa pengaruh yang besar di dunia jurnalistik melalui kelebihan-kelebihannya. Media online memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh media cetak dan media elektronik. Menurut McLuhan ada empat kekuatan yang dimiliki oleh media online, antara lain: (a) Pembaca dapat menggunakan link untuk menawarkan pengguna (user) dalam membaca lebih lanjut pada setiap berita. (b) Pembaca dapat memperbarui berita secara langsung dan teratur. (c) Kurangnya keterbatasan ruang, namun informasi di online sangat luas. (d) Tersedianya penambahan suara, video, dan konten online yang dimiliki media cetak yang dapat menyimpan arsip secara online dari zaman ke zaman (McLuhan, 1996, p. 126).

Dengan demikian, dari beberapa

pengertian dan istilah yang merujuk kepada media online, pada kajian ini dapat ditarik satu definisi yang dapat digunakan dalam membingkai framing media. Media online memiliki kelebihan untuk memberitakan secara riil time, adanya interaktivitas, hypertext, dan multimedia. Pembaca media online dapat dimudahkan dengan satu klik bait secara langsung dapat mencermati berita yang dikeluarkan oleh laman media online itu sendiri.

Analisis Framing Media

Analisis framing adalah penjelasan tentang bagaimana media memframing suatu peristiwa yang dikonstruksi dari realita. Secara teknis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk memframing seluruh bagian berita. Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian (*happening*) penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis. Namun, bagian-bagian kejadian penting merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui khalayak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide yang diberitakan (Sobur, 2009, p. 172).

Sementara itu, analisis framing menurut Entman setidaknya mengkaji dua hal yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penekanan dan penonjolan yang dimaksud Entman adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol memiliki tekanan tertentu dan kemungkinan ada perhatian yang sangat besar dalam mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas (Entman, 2004).

Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi

isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain untuk menampilkan aspek tertentu. Aspek awak media dalam memframing isu dengan menggunakan berbagai strategi wacana, penempatan yang mencolok (menempatkan di *headline* depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/ peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain- lain (Eriyanto, 2011, pp. 73-76).

Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Entman, 2004).

Tabel 1. Aspek atau Unsur Perangkat Analisis Framing Entman

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (<i>included</i>) dan ada yang tidak dimasukkan (<i>excluded</i>). Tidak semua aspek atau bagaian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan Aspek	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu isu/peristiwa tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Sumber: Entman, 2004.

Framing pada dasarnya merujuk pada pemberian defenisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Wartawan memutuskan apa yang akan diberitakan, apa yang akan diliput dan apa yang harus dibuang, dan apa yang ditonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak (Eriyanto, 2011, pp. 221-223).

Frame berita timbul dalam dua level; pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peris-

tiwa. Frame berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep simbol, citra yang ada dalam narasi berita. Karenanya, frame dapat dideteksi dan diselidiki dari kata, citra dan gambar tertentu yang memberi makna tertentu dari teks berita. Kosa kata dan gambar itu ditekankan dalam teks sehingga lebih menonjol dibandingkan bagian lain dalam teks. Itu dilakukan lewat pengulangan, penempatan yang lebih menonjol, lebih mudah dilihat, diingat, dan lebih mudah mempengaruhi khalayak. Secara luas, pendefinisian masalah ini menyertakan didalamnya konsepsi dan skema interpretasi wartawan. Pesan, secara simbolik menyertakan sikap dan nilai yang menginterpretasikan makna di dalamnya.

Tabel 2. Konsep Framing Media Menurut Etzman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor/seseorang) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make Moral Judgement	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Entman, 2004.

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis berdasarkan data analisis yang menggunakan metode kualitatif. Metode ini kerap menjadi acuan bagi peneliti di bidang komunikasi terutama berbasis analisis framing media (Deddy, 2003). Metode penelitian di bidang komunikasi yang berhubungan dengan analisis framing digunakan untuk melihat konstruksi media dalam memberitakan suatu fenomena. Memahami analisis framing media online juga digunakan dengan menggambarkan realitas dalam bingkai berita (Bungin, 2008, p. 68). Untuk itu, peneliti membatasi tiga media online—Detiknews.com, CNNIndonesia.com, dan Kompas.com—sebagai upaya untuk memahami bingkai media dalam memberitakan Islam Nusantara.

Penelitian ini hanya fokus untuk memahami bingkai media online dengan batas waktu tertentu. Batasan waktu ini pada bulan November tahun 2018. Semua data pemberitaan dari ketiga media tersebut fokus pada polemik Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merespon istilah

“Islam Nusantara” yang telah populer di masyarakat. Metode analisis framing media online ini menggunakan kerangka analisis Entman tentang empat aspek utama dalam memahami konstruksi media massa (define problems, diagnoses causes, make moral judgment, dan treatment recommendation) (Entman, 2004). Secara umum, analisa data penelitian menggunakan studi kualitatif dalam perspektif komunikasi (Saunders et al., 2018).

Interpretasi Analisis Framing Tiga Media Online

Pada bagian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan hasil analisis dan interpretasi makna atas pemberitaan yang disajikan oleh tiga media online, yakni Detiknews.com, Kompas.com, dan CNNIndonesia.com. Penulis membaginya ke dalam sub bab berikut ini.

Analisis Framing dalam Detiknews.com

Berikut ini data-data pemberitaan

di Detiknews.com tentang Islam Nusantara.

- Ma'ruf Amin: Islamnya MUI Itu Islam Nusantara, Islam Berkemajuan
- Ma'ruf Amin: Islam Nusantara Bagian dari RI, MUI Tak Boleh Mencela
- Kata Alissa Wahid tentang Penolakan MUI Sumbar pada Islam Nusantara
- MUI Pusat Evaluasi Keputusan MUI Sumbar Tolak Islam Nusantara

- Heboh Islam Nusantara
- MUI Sumbar Tolak Islam Nusantara, Ini Kata MUI Pusat
- MUI Sumatera Barat Tolak 'Islam Nusantara'
- Islam Nusantara dan Akulturasi Agama-Budaya

Lihat pada tabel 3. interpretasi Analisis Framing dalam Media Online Detiknews.com

Isi Pemberitaan	Interpretasi
<p style="text-align: center;">Define Problems</p> <ul style="list-style-type: none"> • MUI tidak boleh mencela "Islam Nusantara". • Islamnya MUI itu, Islam Nusantara dan berkemajuan. • "Islam Nusantara" bagian dari Republik Indonesia (RI). • MUI Sumbar dapat teguran dari MUI Pusat. • MUI Sumbar gagal paham dengan konsep "Islam Nusantara" • MUI Sumbar dengan tegas menyatakan tanpa ada keraguan bahwa 'Islam Nusantara' dalam konsep/pengertian definisi apa pun tidak dibutuhkan di Ranah Minang (Sumatera Barat). • Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar menolak "Islam Nusantara" di Padang, 21 Juli 2018. Dengan adanya penolakan ditegaskan melai hasil Rapat Koordinasi Daerah MUI Sumbar dan MUI Kabupaten/Kota Se-Sumbar menghasilkan kesimpulan untuk menolak Islam Nusantara. 	<p style="text-align: center;">Interpretasi</p> <p>Dilihat dari sudut pandang pihak Detiknews.com dalam mendefinisikan masalah polemik ulama di kawasan MUI di balik istilah "Islam Nusantara", lebih mengarah ke pihak yang pro terhadap konsep "Islam Nusantara". Meskipun demikian, terdapat sedikit ulasan tentang respon pihak yang kontra (MUI Sumbar) dengan memuat pernyataan Buya Gusrizal Gahazar bahwa MUI Sumbar menolak "Islam Nusantara" melalui akun facebooknya. Ideologi Detiknews.com lebih berpihak kepada pihak kontra. Detiknews.com memberanikan diri mengangkat pendefinisian isu "Islam Nusantara" lebih mendominasi pemberitaan tentang MUI Sumbar menolak Islam Nusantara dengan diikuti penjelasan bahwa MUI Sumbar gagal paham dengan konsep "Islam Nusantara".</p>
<p style="text-align: center;">Diagnose Causes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya penolakan ditegaskan melalui hasil Rapat Koordinasi Daerah MUI Sumbar dan MUI Kabupaten/Kota se-Sumbar menghasilkan kesimpulan untuk menolak Islam Nusantara. Dan penolakan direpson oleh pihak yang pro dari Ketua MUI Pusat Ma'ruf Amin mengatakan tidak boleh mencela aliran apapun dan tidak akan memberikan sanksi tegas kepada pengurus MUI Sumbar, akan tetapi hanya akan diberi pelurusan soal kesalahpahaman MUI Sumbar. 	<p style="text-align: center;">Diagnose Causes</p> <p>Secara keilmuan linguistik, pemilihan diksi yang digunakan dalam penentuan judul oleh wartawan Detiknews.com terpampang nyata bahwa ideologinya mendukung pihak yang pro, salah satu bukti realnya, hampir semua judul pemberitaan menggambarkan MUI Sumbar menolak konsep "Islam Nusantara", dan kelihatan dari rincian berita, pihak Detiknews.com memojokkan pihak yang kontra dengan memunculkan kalimat disemua pemberitaan bahwa MUI Sumbar gagal paham akan konsep "Islam Nusantara" yang dikemukakan lewat narasumber yang pro terhadap konsep "Islam Nusantara".</p>

Define Problems	
	<p>Detiknews.com mencoba untuk netral dengan menampilkan respon MUI Sumbar akan penyebab polemik ini, akan tetapi hanya menampilkan sekelumit dari pernyataan MUI Sumbar, pernyataannya pun diambil dari akun media sosial Buya Gusrizal Gahazar, tanpa ada wawancara langsung dengan pihak MUI Sumbar dan pihak kontra lainnya, sementara Detiknews.com lebih banyak mewawancarai MUI Pusat. Sehingga sangat kelihatan bahwa Detiknews.com adalah media online yang masih jauh dari kenetralan jika ditinjau dari teoritis dan prinsip dalam pemuatan berita. Seharusnya wartawan mengkonstruksi realitas dengan mewawancarai kedua belah pihak, tidak berat sebelah atau istiaah sekarang prinsip cover both side (menampilkan dua sisi dalam pemberitaan), walaupun sejatinya media tidak ada yang netral, karena sebuah kepentingan dan ideologi yang berbeda.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sedangkan pihak yang kontra yaitu MUI Sumbar, menolak konsep "Islam Nusantara" karena memiliki sejumlah pertimbangan yaitu istilah "Islam Nusantara" mengandung perdebatan yang tidak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting. • Istilah 'Islam Nusantara', masih menurut MUI Sumbar, bisa membawa kerancuan dan kebingungan dalam memahami Islam. Istilah Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusantara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleransi hanya merupakan satu aspek dalam Islam, padahal banyak aspek lain dalam Islam. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspeknya saja, melainkan harus menyeluruh. • Memperkirakan masalah atau sumber masalah. Kehebohan ini, wartawan Detiknews.com mengkonstruksi penyebab polemik antara ulama di kawasan MUI berangkat dari perbedaan pemahaman soal "Islam Nusantara", yaitu kegagalan MUI Sumbar dalam memahami konsep "Islam Nusantara". • MUI Sumbar dan MUI Kabupaten/Kota se-Sumbar menyatakan bahwa ada keraguan bahwa "Islam Nusantara" dalam konsep/pengertian definisi apa pun tidak dibutuhkan di Ranah Minang (Sumatera Barat). Bagi Sumbar, nama 'Islam' telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apa pun, . Keputusan seperti ini memicu MUI Pusat untuk berkomentar, bahwa MUI Sumbar masih butuh pelurusan makna "Islam Nusantara". Hal ini diperparah lagi oleh beberapa pihak seperti Dewan Pembina The Wahid Institute, Alissa Wahid mengatakan bahwa MUI Sumbar tidak paham dengan konsep "Islam Nusantara", sehingga perlu dialog antara MUI Pusat dengan MUI Sumbar. Ketua Umum Pengurus Besar NU, KH. Said Aqil Siraj juga mengatakan hal yang sama. 	

Make Moral	Judgement
<p>Ma'ruf mengatakan seharusnya sikap MUI khususnya MUI Sumbang semestinya menampung semua ajaran Islam, termasuk Islam Nusantara. Yang jelas, MUI tidak boleh menampung ajaran yang menyimpang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid Sa'adi mengklarifikasi bahwa sikap MUI Sumbang dalam membuat keputusan Rapat Koordinasi Bidang Ukhuwah MUI Provinsi Sumatera Barat sudah menyalahi khittah dan jati diri MUI sebagai wadah berhimpun, musyawarah dan silaturahmi para ulama, dan cendekiawan muslim dari berbagai kalangan dan organisasi. Seharusnya MUI sebagai tenda besar umat Islam bisa menjadi pemersatu dan perekat persaudaraan (ukhuwah) Islamiyah bukan sebaliknya. Zainut mengatakan MUI semestinya mengedepankan semangat persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh), dan moderasi (tawazun) dalam menyikapi berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan umat Islam. Sehingga, dalam mengambil sikap, MUI tidak membuat kondisi di masyarakat menjadi renggang. Zainut mengatakan MUI punya panduan dalam menyikapi perbedaan paham keagamaan di kalangan umat Islam yang ada dalam putusan Ijtima Ulama MUI di Gontor. Putusan ini dituangkan dalam Dokumen Taswiyatul Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Keagamaan). Dalam menyikapi perbedaan paham keagamaan yang sifatnya masih dalam cabang agama, MUI harus cerdas untuk menyikapinya. Dan sepanjang masih dalam wilayah perbedaan (majal al-ikhtilaf), dan belum membahas ke pokok agama tidak perlu dijadikan polemik. 	<p>Elemen framing yang digunakan untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat adalah gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. Seperti yang dikemukakan oleh wartawan Detiknews.com bahwa MUI Sumbang harus bersikap seperti MUI Pusat, semestinya menampung semua ajaran Islam, termasuk Islam Nusantara. Yang jelas, MUI tidak boleh menampung ajaran yang menyimpang. Serta pihak media dalam membenaran argumentasi dari pendefinisian masalahnya dengan mengkonstruksi realitas bahwa menyikapi perbedaan dalam pemahaman keagamaan yang sifatnya cabang agama, tidak perlu untuk dijadikan polemik di kalangan MUI.</p>

Treatment Recommendation	
<ul style="list-style-type: none"> • MUI provinsi wajib mematuhi aturan MUI pusat. • Ma'ruf Amin mengingatkan sesama elemen bangsa tidak boleh saling hantam. MUI Pusat yang setuju dengan konsep Islam Nusantara menyebut penolakan dari Rana Minang itu gara-gara pemahaman yang tidak selaras. Itu soal pemahaman yang perlu disinkronkan saja. Pemahaman yang belum sama frekuensinya. • Ma'ruf selaku Ketua Umum MUI tidak akan memberikan sanksi tegas kepada pengurus MUI Sumbar. Mereka akan diberi pelurusan soal konsep Islam Nusantara. • MUI Pusat akan mengevaluasi putusan dari MUI Sumbar tersebut. Dewan Pimpinan MUI memastikan akan mengevaluasi putusan tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan organisasi yang ada. • Dewan Pembina The Wahid Institute, Alissa Wahid menilai penolakan itu karena ada ketidakpahaman. Seharusnya sangat perlu dialog lebih dalam, setidaknya berdialog dengan MUI Pusat. 	<p>Penyelesaian yang dikonstruksi oleh Detiknews.com adalah penyelesaian yang adem yaitu mengutamakan perdamaian antara pihak MUI Pusat dengan MUI Sumbar yaitu dengan menghadirkan solusi adanya pengevaluasian terhadap keputusan penolakan MUI Sumbar terhadap konsep "Islam Nusantara" yang diambil dari pernyataan Ma'ruf Amin, dan perlunya dialog antara MUI Pusat dengan MUI Sumbar. Walaupun kemungkinan penyelesaian ini tidak menguntungkan pihak MUI Sumbar yang berketut untuk menolak "Islam Nusantara". MUI provinsi tetap wajib mematuhi aturan MUI Pusat sesuai dengan peraturan yang ada di kawasan MUI.</p>

Data yang di peroleh penulis berupa pemberitaan judul berita, pemilihan diksi, jumlah konten yang dimuat oleh media, narasumber/tokoh yang memberikan tanggapan dalam polemik ulama kawasan MUI di balik Konsep “Islam Nusantara” pada Detiknews.com, dapat disimpulkan bahwa Detiknews.com dalam melakukan framing belum bisa dikatakan netral, akan tetapi sudah ada sedikit percikan kenetralan. Detiknews.com tetap memberitakan respon MUI Sumbar dan menunjukkan pertimbangan dan keputusan yang dimuat oleh MUI Sumbar walaupun hanya sekelumit jika dibandingkan dengan pernyataan yang mendominasi oleh narasumber MUI Pusat.

Jika ditinjau dari pemilihan judul, jelas diketahui Detiknews.com pro terhadap MUI Pusat yaitu setuju akan konsep “Islam Nusantara”, dan mengkontruksi sumber masalah datang dari pihak MUI Sumbar. Adapun intisari dari judul keseluruhan dan pemilihan diksi yang dimuat adalah untuk menunjukkan bahwa MUI Sumbar melakukan penolakan dilandaskan MUI Sumbar tidak paham dan dibutuhkan pelurusan atas pemahamannya. Sedangkan dari penentuan narasumber atau tokoh yang dihadirkan lebih mendominasi pihak yang pro “Islam Nusantara” yaitu Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Siraj, Asrorun Niam,

dan Alissa Wahid yang notabennya pro akan konsep “Islam Nusantara”. Sedangkan pihak kontra, Detiknews.com hanya mencatumkan pernyataan MUI Sumbar yang dilansir dari media sosialnya tentang penolakan dan keputusan penolakan “Islam Nusantara” tanpa ada wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang kontra “Islam Nusantara”. Jika dilihat dari pemberitaan Detiknews.com, media online ini memberitakan tentang polemik ulama dikawasan MUI dibalik konsep “Islam Nusantara” sebanyak delapan kali pemberitaan, akan tetapi hanya membahas sekelumit pernyataan pihak Kontra.

[Analisis Framing dalam CNNIndonesia.com](#)

- Berikut ini data-data pemberitaan di CNNIndonesia.com tentang Islam Nusantara.
- Khotbah, Ketua MUI Sumbar ‘Harga Mati’ Tolak Islam Nusantara (22 Agustus 2018)
- MUI Sumbar: Islam Nusantara Tidak Dibutuhkan di Ranah Minang (25 Juni 2018)
- MUI Sebut Penolakan Islam Nusantara di Sumbar Salah Khittah (25 Juni 2018)
- PBNU Sebut MUI Sumbar Gagal Paham Soal Islam Nusantara (27 Juni 2018)

Tabel 3. Interpretasi Analisis Framing dalam Media Online CNNIndonesia.com

Isi Pemberitaan	Interpretasi
Define Problems	
<ul style="list-style-type: none"> • Islam Nusantara di Sumbar salah satu Khittah dan jati diri MUI. • Khotbah ketua MUI Sumbar “Harga Mati” tolak Islam Nusantara. • Jika ingin sampaikan “Islam Nusantara”, tawarkan sana ke negeri lain. Untuk tanah Minang tidak, kata Gusrizal. 	<p>Dalam surat keputusan tersebut tertulis “MUI Sumbar dan MUI Kabupaten/Kota se-Sumbar menyatakan tanpa ada keraguan bahwa “Islam Nusantara” dalam konsep atau definisi apapun tidak dibutuhkan di Ranah Minang (Sumbar).</p>
Diagnose Causes	
<ul style="list-style-type: none"> • Tanah Minang menurut MUI Sumbar tidak membutuhkan konsep Islam Nusantara tersebut. Dalam surat keputusan tersebut tertulis “MUI Sumbar dan MUI Kabupaten/Kota se-Sumbar menyatakan tanpa ada keraguan bahwa “Islam Nusantara” dalam konsep atau definisi apapun tidak dibutuhkan di Ranah Minang (Sumbar). Bagi kami nama “Islam” telah sempurna dan tidak perlu ditambah lagi dengan embel-embel apapun”. • Surat keputusan MUI terkait penolakan pada konsep Islam Nusantara tersebar di media sosial. MUI Sumbar menjelaskan, jika yang dimaksudkan “Islam Nusantara” adalah Islam yang toleran, tidak radikal, kemudian memperhadapkan dengan kondisi Timur Tengah saat ini, maka sikap tersebut mengandung tuduhan terhadap ajaran Islam sebagai pemicu lahirnya sikap radikal dan tindakan kekerasan. 	<p>Narasumber yang dihadirkan hanya pihak yang pro dan kontra, tanpa menghadirkan pihak yang netral dalam pemberitaannya.</p>
Make Moral Judgement	
<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Islam Nusantara merupakan penzaliman terhadap Islam dan pandangan yang dangkal terhadap konflik Timur Tengah. • Menurut MUI Sumbar, Islam sudah sempurna, jadi Islam jangan dikotak-kotakkan dengan label apapun, jika ada penambahan berarti mengurangi makna. MUI Sumbar tidak akan geser setapak pun, tidak akan cabut keputusan ini tentang penolakan “Islam Nusantara”. MUI Sumbar menganggap jika label ‘Nusantara’ selain untuk Islam hanya berpotensi mengkotak-kotakkan umat Islam dapat memunculkan pandangan negatif umat kepada saudara-saudara muslim di wilayah lain. 	<p>MUI Sumbar menegaskan Ranah Minang tidak membutuhkan konsep “Islam Nusantara” demi masyarakat bisa hidup secara damai dan toleransi. Sebab, tanpa konsep itu pun MUI Sumbar mengakui kehidupan umat Islam di tanah Minang sudah cukup toleran</p>

Treatment Recommendation	
<ul style="list-style-type: none"> • Ulama dikawasan MUI seharusnya mengedepankan semangat persaudaraan (<i>ukhuwah</i>), toleransi (<i>tasamuh</i>) dan moderasi (<i>tawazun</i>) dalam menyikapi berbagai persoalan khususnya yang berkaitan dengan masalah umat Islam. • Marsudi mengatakan bahwa konsep Islam Nusantara bukanlah sebuah ajaran atau aliran agama baru yang keluar dari koridor syariat Islam. Islam Nusantara merupakan suatu konsepsi Islam yang turut mempertimbangkan adanya budaya dan adat istiadat lokal khas yang ada di Indonesia. Marsudi menyarankan agar pengurus MUI Sumbar terlebih dulu memahami dan menggali lebih lanjut soal konsepsi Islam Nusantara sebelum mengambil keputusan untuk melarang konsepsi tersebut. 	<p>MUI berharap agar masalah Islam Nusantara tidak perlu dibesar-besarkan dan dipersoalkan karena justru dapat merusak hubungan persaudaraan sesama umat Islam. MUI sebagai tenda besar umat Islam bisa menjadi pemersatu dan perekat ukhuwah Islamiyah bukan sebaliknya.</p>

Dilihat dari sudut pandang pihak CNNIndonesia.com dalam pemberitaan polemik ulama dikawasan MUI dibalik konsep “Islam Nusantara” lebih mengarah ke pihak yang pro terhadap konsep “Islam Nusantara” dan terkesan memprovokasi masyarakat untuk heboh menanggapi konstruksi realitas yang di framing, karena banyak menggunakan pemilihan diksi judul maupun isi dengan menggunakan kata-kata yang provokatif seperti Islam Nusantara di Sumbar salah Khittah dan jati diri MUI, khotbah ketua MUI Sumbar “Harga Mati” tolak Islam Nusantara, jika ingin sampaikan “Islam Nusantara”, tawarkan sana ke negeri lain. Untuk tanah Minang tidak. Pemilihan diksi seperti ini

sangat memicu emosional pembaca.

Analisis Framing dalam Kompas.com

Berikut ini data-data pemberitaan di Kompas.com tentang Islam Nusantara.

- MUI Harus Tegaskan Karakternya sebagai Representasi Islam Nusantara (16 November 2018).
- Penolakan Terhadap Islam Nusantara, Murni Karena Alasan Agama Atau Politis? (17 Agustus 2018).
- Heboh tentang Penolakan MUI Sumbar terhadap Islam Nusantara (17 Juli 2018).

Tabel 4. Interpretasi Analisis Framing dalam Media Online Kompas.com

Isi Pemberitaan	Interpretasi
Define Problems	
<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan konsep “Islam Nusantara” murni karena alasan agama atau politis? • Heboh tentang penolakan MUI Sumbar terhadap “Islam Nusantara”. 	<p>Jika ditinjau dari pendefinisian masalah pada Kompas.com, media ini memilih kata yang cukup damai tidak separah CNNIndonesia.com yang provokatif.</p>

Define Problems	
<ul style="list-style-type: none"> MUI harus tegaskan karakternya sebagai representasi “Islam Nusantara”. 	
Diagnose Causes	
<ul style="list-style-type: none"> Istilah “Islam Nusantara” datang dari tokoh-tokoh NU dan kemudian oleh ormas terbesar ini mengangkat tema pada Muktamar NU ke 33 di Jombang, Jawa Timur pada Agustus 2015, Muktamar tersebut mengangkat tema “meneguhkan Islam Nusantara untuk Membangun Peradaban Indonesia dan Dunia”. 	<p>Media ini dalam memperkirakan masalah ditinjau dari sejarah awalnya gempar konsep “Islam Nusantara” di Indonesia, serta mempertimbangkan pernyataan antara pihak yang pro dan kontra.</p>
Make Moral Judgement	
<ul style="list-style-type: none"> Jika dicermati pesan yang disampaikan NU tentang Islam Nusantara ini ialah adanya kaitan yang erat antara nilai-nilai Islam yang berinteraksi dengan nilai atau budaya lokal yang ada di negeri ini. Dengan interaksi yang demikian hadirilah sebuah masyarakat Islam di Nusantara yang berbeda dengan masyarakat Islam yang ada di negeri lain. Perlu digaris bawahi yang dikemukakan itu adalah tentang masyarakat Islam bukan tentang ajaran Islam yang berbeda. Islam Nusantara bukan aliran maupun agama baru, akan tetapi pemikiran yang berlandaskan sejarah Islam masuk ke Indonesia bukan melalui peperangan akan tetapi dengan kompromi budaya. Said Aqil menjelaskan Islam Nusantara tidak mungkin membuat orang radikal, karena tidak mengajarkan kepada kebencian atau bahkan membunuh. KH Wahab Chasbullah salah seorang pendiri NU mengatakan “cinta tanah air merupakan bagian dari iman”. 	<p>Dalam penentuan narasumber yang dilibatkan dalam artikel yang dimuat dalam pemberitaan polemik ulama di kawasan MUI di balik konsep “Islam Nusantara”, kompas.com dengan menghadirkan pihak yang pro, kontra, serta yang netral.</p>
Treatment Recommendation	
<ul style="list-style-type: none"> Seharusnya polemik antara ulama di Kawasan MUI dibalik konsep “Islam Nusantara” dibicarakan secara tertutup jika memang ada substansi Islam Nusantara yang salah, menghadirkan kedua bela pihak, baik MUI Pusat maupun MUI Sumbar agar tidak ada kesalah pahaman. 	<p>Solusi yang ditawarkan sangat bijak dalam pemberitaannya yaitu perlunya komunikasi internal antara pihak MUI Pusat dan MUI Sumbar.</p>

Kompas.com lebih netral dibandingkan dengan Detiknews.com dan CNNIndonesia.com. Media ini menggunakan prinsip cover both side dan pemberitaannya lebih banyak berbentuk artikel ataupun opini masyarakat. Dalam pemilihan narasumber yang ditampilkan dalam pemberitaan terkesan seimbang, karena diambil dari kalangan yang pro dan kontra serta pihak yang netral. Sehingga argumen yang di dapat lebih seimbang. Secara umum media ini terlihat positif dalam menanggapi pemberitaan polemik ulama di kawasan MUI di balik konsep “Islam Nusantara”. Dengan data yang di kumpulkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa media ini memposisikan diri di tengah-tengah. Jika dilihat dari konten berita dan pemilihan diksi, media ini lebih adem pemilihan diksinya, tanpa menjatuhkan pihak pro dan kontra. Hal ini dikarenakan semua pernyataan dibahas pada artikel, serta lebih rinci menanggapi. Akan tetapi, dibandingkan dengan media lainnya, media ini lebih fokus pemberitaannya dengan lewat artikel, dan pemberitaan tentang polemik ulama sangat terbatas.

Polemik Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengenai Istilah Islam Nusantara dalam Media Online

Media online Detiknews.com, CNNIndonesia.com, dan Kompas.com dalam memberitakan isu “Islam Nusantara” yang tengah populer di Indonesia dan memicu beragam pandangan. Secara otomatis ada pihak pro dan kontra dalam melihat isu tersebut. Jika dicermati dari pihak MUI, polemik muncul karena ada perbedaan pemahaman tentang konsep “Islam Nusantara” antara MUI Pusat dengan MUI Sumbar. Selain dari kalangan ulama,

cukup banyak pula pihak yang pro dengan istilah “Islam Nusantara”. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Selain Jokowi, dukungan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sering memakai istilah “Islam Indonesia”.

Istilah Islam Nusantara kini menjadi sebuah wacana yang mendunia termasuk menjadi diskursus di perguruan tinggi ternama Eropa maupun Amerika. Setelah menjadi wacana publik, Islam Nusantara dibahas dari perspektif yang beragam, sekaligus beragam tanggapan, baik yang pro maupun kontra. Dalam konteks ini makna Islam Nusantara menemukan relevansinya. Untuk itu, sebagai respon atas dinamika yang berkembang berikut penulis membahas pbingkaian media online yang menjadi topik utama penelitian ini.

Dalam konteks MUI, seperti sebuah simalakama. MUI berdiri sebagai lembaga negara yang independen untuk mengadopsi pemikiran umat Islam sejak era orde baru. MUI telah menjadi lembaga akomodatif politik era Soeharto. Di rezim otoriter, MUI dimanfaatkan sebagai wadah politik Islam bagi kelompok-kelompok keagamaan (Makin, 2017, p. 28). Namun di era reformasi, MUI mampu mengembalikan citra positif atas keselarasan politik di masa Orde Baru. Citra ini dibangun dengan mengakomodir semua kelompok keagamaan Islam. Seiring dengan perkembangan dinamika politik nasional, MUI juga telah berkembang menjadi lembaga yang banyak disusupi oleh kelompok Islam konservatif (Ichwan, 2016). Kondisi ini membuat posisi MUI lebih mengarah kepada kepentingan Islam konservatif yang banyak diantara produknya, seperti sertifikat *halal* dan fatwa, cenderung keras (Gillespie, 2007).

Atas fakta tersebut, tak heran jika

sikap MUI ketika merespon beragam konstruksi sosial budaya, khususnya istilah Islam Nusantara cenderung anti bahkan memusuhinya. Hal ini sebagai konsekuensi dari dibukanya keran yang lebar dalam katup penerimaan anggota MUI. Lebih menohok, ketika kasus Ahok, peristiwa 212 adalah bukti bahwa MUI menjadi motor gerakan politik dan menjadi roda penggerak politik identitas di negeri ini (Salam, 2018). Untuk itu, analisis framing media atas respon MUI dalam beragam pemberitaan ada yang cenderung tidak netral. Kondisi ini menjadikan sebuah analisis bahwa media online kurang memperhatikan kaidah pemberitaan yang hakiki. Namun justru cenderung terjebak pada narasi MUI yang mengedepankan nilai-nilai Islam fundamentalisme.

Dari sini kita dapat memetakan bahwa istilah Islam Nusantara yang telah menjadi perdebatan publik, justru mendapat respon negatif dari MUI. Kecermatan dalam memahami unsur berita dari bergama media online, pada aspek ini membutuhkan analisis yang cukup mendalam. Kita tidak terjebak pada aspek *counter* narasi yang diusung oleh kelompok Islam konservatif yang telah masuk ke dalam relung kepengerusuhan MUI. Dengan demikian, media online harus bersikap netral dan tidak boleh memihak kepada kelompok satu dengan yang lainnya. Apalagi isu Islam Nusantara bukan perkara baru. Perdebatan teman Islam Nusantara telah lama berkembang di Indonesia. Tidak jarang ditemukan juga beragam studi keislaman Indonesia telah dikaji oleh para ilmuwan barat dengan sekian keunikan yang muncul (Luthfi, 2016). Lokalitas, akulturasi budaya, penerimaan budaya lokal, hingga identitas pribumi telah banyak ditemukan beragam referensi yang menyoal hal tersebut.

Penutup

Berdasarkan analisis framing terhadap tiga media online yang notabenehnya selalu mengikuti perkembangan berita “Islam Nusantara”, Detiknews.com memunculkan berita tentang polemik ulama di kawasan MUI di balik konsep “Islam Nusantara sebanyak 8 kali pemberitaan”, CNNIndonesia.com sebanyak 5 kali, dan Kompas.com sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh penulis berupa pemberitaan gambar visual, judul berita, pemilihan diksi, jumlah konten, narasumber/tokoh yang dilibatkan, Detiknews.com dalam melakukan framing belum bisa dikatakan netral, akan tetapi sudah ada sedikit percikan kenetralan dengan menampilkan pernyataan sekelumit pihak kontra walaupun didominasi pernyataan pihak pro. Sementara itu, CNNIndonesia.com lebih terkesan memprovokasi masyarakat untuk heboh menanggapi konstruksi realitas yang diframing, karena banyak menggunakan pemilihan diksi judul yang provokatif seperti Islam Nusantara di Sumbar salah Khittah dan jati diri MUI, khotbah ketua MUI Sumbar “Harga Mati” tolak Islam Nusantara, jika ingin sampaikan “Islam Nusantara”, tawarkan sana ke negeri lain, untuk tanah Minang tidak. Adapun Kompas.com lebih netral dibandingkan dengan Detiknews.com dan CNNIndonesia.com. Media ini menggunakan prinsip *cover both side* dan pemberitaannya lebih banyak berbentuk artikel ataupun opini masyarakat.

Titik pijak konstruksi pemberitaan online ini harus menjadi dasar untuk mengembangkan studi lanjutan. Keterbatasan obyek kajian pada penelitian ini perlu diperbaiki di masa depan. Adapun rekomendasi yang penulis sajikan adalah bagaimana respon MUI atas beragam fenomena kekerasan atas nama agama

dalam framing media massa yang lebih luas. Hal ini perlu dianalisis lebih jauh mengingat perubahan kepemimpinan dan anggota MUI telah berganti. Bahkan sudah ada banyak perwakilan dari kelompok Islam moderat mengisi kepengurusan MUI itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Alma'arif, A. (2015). Islam Nusantara: Studi Epistemologis dan Kritis. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(2), 265–292.
- Azra, A. (1998). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XII dan XVII*. Bandung: Mizan.
- Bleyer, W. G. (2015). *How To Write Special Feature Articles*. Oxford: Pergamon Press.
- Bungin, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Burbules, N. ., & Torres, C. . (2000). *Globalization and Education: Critical Perspectives*. New York: Routledge.
- Craig, R. (2005). *Online Journalism: Reporting, Writing, and Editing for New Media*. USA: Thomson Wadsworth.
- Deddy, M. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Entman, R. (2004). *Projections of Power: Framing News, Public Opinion and US Foreign Policy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Gillespie, A. (2007). Current issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 council of Indonesia ulama fatwa No. 7 opposing pluralism, liberalism, and secularism. *Journal of Islamic Studies*, 18(2), 202–240.
- Huda, N. (2013). *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ichwan, M. N. (2016). MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang. *Ma'arif Institute*, 87–104.
- Karim, A. M. (2007). *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Luthfi, K. M. (2016). Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.53>
- Makin, A. (2017). *Nabi-Nabi Nusantara Kisah Lia Eden dan Lainnya*. Yogyakarta: Suka-Press.
- McLuhan, M. (1996). *Understanding Media: The Extensions of Man*. Cambridge: MIT Press.
- Mubarok, A. A., & Rustam, D. G. (2018). Islam Nusantara: Moderasi Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.21580/jish.32.3160>
- Munfaridah, T. (2017). Islam Nusantara Sebagai Manifestasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mewujudkan Perdamaian. *Wahana Akademi: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(1), 19–34. <https://doi.org/10.21580/wa.v4i1.1476>
- Ninian, S. (2003). The Global Future of Religion”. In Mark Juergensmeyer (Ed.), *Global Religion: An Introduction*. Oxford: Oxford Uni-

- versity Press.
- Pribadi, Y. (2019). Identity Contested: Cultural Resilience in the Midst of Islamization of Politics. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 255–280. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.255-280>
- Ricklefs, M. C. (Merle C. (1991). *Islam in the Indonesian social context*. Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Ricklefs, M. C. (Merle C. (2012). *Islamisation and its opponents in Java: a political, social, cultural and religious history, c. 1930 to the present*. NUS Press.
- Romli, M. G. (2018). Akar-akar Historis dan Geografis Islam Nusantara. Retrieved November 15, 2018, from www.gunromli.com website: <https://www.gunromli.com/2018/07/akar-akar-historis-dan-geografis-islam-nusantara/>
- Sahal, A., & Aziz, M. (2015). *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih Hingga Konsep Historis*. Bandung: Mizan.
- Salam, A. (2018). The Hoax Phenomenon in Indonesian Society: Ob-
serving Anti-Diversity Memes since 2014. *Jurnal Humaniora*, 30(3), 315–324. <https://doi.org/10.22146/jh.v30i3.38891>
- Salim, A. (2013). Javanese religion, Islam or syncretism: comparing Woodward's Islam in Java and Beatty's Varieties of Javanese Religion. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 223. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.223-266>
- Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., & Bartlam, B. (2018). Saturation in qualitative research: Exploring its conceptualisation and operationalisation. *Quality & Quantity*, 52(4), 1893–1907.
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Stephens, M. (1998). *The Rise of the Image, the Fall of the Word*. USA: Oxford University Press.
- Tjandrasasmita, U. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Penerbit KPG.

